

ABSTRAK
PERGESERAN ASAS PUBLISITAS
DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

Oleh : Meidy Triasavira, Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.,
dan Imam Rofiqi, S.H., M.Kn

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yaitu dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman (publisitas) dalam pembuktian pemilikan tanah antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Maka dari itu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengumuman pendaftaran tanah pertama kali yang kurang dari ketentuan perundang-undangan dan bagaimana upaya hukum dari pemilik hak atas tanah apabila sertifikatnya dimohonkan oleh orang lain yang telah melewati proses pengumuman.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Jenis data yang digunakan meliputi primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbedaan peraturan jangka waktu pengumuman (publisitas) pendaftaran tanah tersebut ialah kedudukan sertifikat yang diterbitkan dari kedua peraturan tersebut *sah* sebelum ada pembatalan hak dan putusan *Judicial Review*, sedangkan dampak dari jangka waktu pengumuman (publisitas) perbedaan pengaturan yang lebih pendek tersebut ialah mengenai hilangnya hak subjek hukum lainnya. Pembatalan hak ada dua jenis yaitu karena cacat hukum administrasi dan karena putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Apabila ada pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung (*Judicial Review*). Selain itu, pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan wawasan mengenai ketentuan dan sanksi dalam proses pendaftaran tanah yang benar dan memberikan data yang akurat.

Kata Kunci: Pergeseran, Asas Publisitas, Pendaftaran Tanah

ABSTRACT
PUBLICITY PRINCIPLE SHIFT
IN THE FIRST TIME LAND REGISTRATION

By : Meidy Triasavira, Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.,
and Imam Rofiqi, S.H., M.Kn

The Indonesian government has organized land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia, namely with the emergence of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program with the aim of ensuring legal certainty. However, in its implementation there are differences in the regulation of the announcement period (publicity) in proving land ownership between Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). .

Therefore, this research was conducted to find out how the legal consequences of the announcement of the first land registration which were less than the statutory provisions and how the legal remedies of the owner of land rights if the certificate was applied for by another person who had passed the announcement process.

The method used in this research is normative and prescriptive in nature, using three types of approaches, namely the legal approach, the analytical approach and the conceptual approach. This study uses a deductive method. The types of data used include primary, secondary, and tertiary. The data collection technique used is library research.

The results of the study show that the legal consequences of the differences in the regulations for the announcement period (publicity) of the land registration are the status of the certificates issued from the two regulations are valid before the cancellation of rights and the decision of the Judicial Review, while the impact of the announcement period (publicity) of the difference in regulations is higher. The short term is about the loss of the rights of other legal subjects. There are two types of cancellation of rights, namely because of defects in administrative law and due to judicial decisions that have permanent legal force (inkracht).

If there are parties who feel that they are disadvantaged in the Complete Systematic Land Registration (PTSL), they can submit a request for judicial review of the laws and regulations to the Supreme Court (Judicial Review). In addition, the government is expected to cooperate with the community in providing insight into the provisions and sanctions in the correct land registration process and providing accurate data.

Keywords: Friction, Publicity Principle, Land Registration.